



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TAHUN 2016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
2016**

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	Iv
Kata Pengantar	V
Ringkasan Eksekutif	Vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Permasalahan Strategis yang dihadapi Direktorat Bindiktara	7
E. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
F. Kepegawaian	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja	17
B. Perencanaan Strategis	21
C. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu	23
D. Kebijakan dan Program	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja 2016 antara Dirjen PAUD dan Dikmas dengan
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Lampiran 2

Target dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja
Direktur Jenderal Paud dan Dikmas dan Direktur Bindiktara Tahun 2016

Lampiran 3

Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan Tahun 2016

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	PERKEMBANGAN ANGGARAN Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dari Perjanjian Kinerja 1 –Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2016	21
Tabel 2	Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016	23
Tabel 3	Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara Berdasarkan Bagian Tahun 2016	27
Tabel 4	Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara Berdasarkan Anggaran Pagu, Perjanjian Kinerja dan, anggaran yang tidak di Perjanjian Kinerjakaan Tahun 2016	53
Tabel 5	Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara Per Jenis Anggaran Tahun 2016	55
Tabel 6	Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara Berdasarkan Subbag Tata Usaha dan Subdit Tahun 2016	56
Tabel 7	Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara yang tidak di Perjanjian Kinerjakaan Tahun 2016	70

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama GAMBAR	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Bindiktara	15
Gambar 2	Kebijakan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	26
Gambar 3	Trend Penduduk Tuna Aksara Usia 15 – 59 Tahun 2010-2016	30
Gambar 4	Peta Sebaran Jumlah Penduduk Niraksara tahun 2015	31



PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamiin, atas bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016. LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai evaluasi diri terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan selama setahun, yaitu kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2016, yang meliputi tingkat keberhasilan, masalah, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program – kegiatan untuk segera mencari pemecahannya.

Tahun 2016 merupakan tahapan tahun ke dua dalam menapaki RPJM 2015 – 2019 yang merupakan rencana kerja jangka menengah Kabinet Kerja. Dengan selesainya restrukturisasi organisasi, yang diikuti dengan rotasi pimpinan dan penataan pegawai secara menyeluruh, serta adanya banyak perubahan kebijakan yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Perubahan-perubahan ini harus memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang signifikan, namun tidak semua dapat tergambarkan dalam LAKIP Tahun 2016 ini.

LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2016 menggambarkan pula pencapaian visi, misi, tujuan, dan target pelaksanaan program-kegiatan Direktorat Bindiktara selama satu tahun. Pada tahun 2016 Direktorat Bindiktara melaksanakan 1 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja kunci.

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2016 ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas program maupun kegiatan untuk tahun 2017 yang lebih baik.

Jakarta, 30 Desember 2016



Dr. Erman Syamsuddin
NIP 195703041988031015



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) untuk tahun 2016 dengan maksud untuk mengetahui gambaran secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Sebagai upaya pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud dan Dikmas) dan Direktur Bindiktara yang didalamnya meliputi 18 indikator kinerja kunci dan target-target yang harus dicapai selama kurun waktu satu tahun 2016. Sasaran strategis yang dimaksud adalah **“Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global”** dengan 18 indikator kinerja kunci (IKK), yaitu: 1) Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar, 2) Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A, 3) Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional, 4) Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional, 5) Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional, 6) Jumlah Komunitas sekolah (Homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR), 7) Jumlah desa

melaksanakan pemberdayaan desa vokasi, 8) Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi, 9) Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan, 10) Jumlah PKBM pembina dan Rumah yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota, 11) Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM, 12) Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat, 13) Jumlah TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan SKB, 14) Satuan pendidikan SKB memperoleh revitalisasi kelembagaan dikmas, 15) Jumlah satuan pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran dikmas, 16) Jumlah NSPK dikmas, 17) Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana, 18) Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi.

Dari 18 IKK, bila disandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas dengan Direktur Bindiktara, realisasinya fisik sebagai berikut:

- sesuai target (100%), sebanyak 7 IKK
- dibawah target (kurang dari 100%), sebanyak 11 IKK

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Bindiktara dan solusi yang diambil adalah: Hal ini terjadi karena realisasi untuk seluruh bagian (Subbag Tata Usaha, Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, Subdit Program dan Evaluasi, Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan dan, Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca) tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*) sangat mempengaruhi dalam pencapaian target anggaran yang terdapat pada empat Subdit (Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, Subdit Program dan Evaluasi, Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan dan, Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca) terutama: adanya

efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengundang mitra dari daerah.

- b. Direktorat Bindiktara mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bindiktara yang dipimpin oleh seorang Direktur melaksanakan 9 fungsi, salah satu fungsi yang berkaitan erat dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas maka timbul berbagai kendala yang dihadapi, **kendala**, **dampak** maupun **solusi** yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*), hal ini merupakan **kendala** yang serius terhadap Direktorat Bindiktara dalam pencapaian kinerja pada tahun 2016; **dampak** dari kendala tersebut di atas adalah: a) berpengaruh pada pengurangan target anggaran dalam DIPA; b) penyaluran bantuan ke lembaga menjadi lebih sedikit dari target yang ditetapkan dan c) terdapat satu kabupaten (Kab. Asmat) yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan. Untuk mengatasi hal tersebut, **solusi** yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 tercapai adalah: a) minta pengarahan dari pimpinan; b) memaksimalkan target satuan walaupun dengan anggaran yang tersedia; c) mengutamakan daerah 3T dalam penyaluran bantuan meskipun dana terbatas, d) mengalihkan kuota bagi kabupaten yang tidak bisa mengakses bantuan akan dialihkan ketempat lain.

2. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dan Paket B mengalami beberapa **kendala** seperti: a) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Direktorat Bindiktara, b) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket A yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, c) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU. Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dan Paket B dengan memberikan **solusi**, sebagai berikut: a) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, b) memilih dan memberdayakan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan c) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU dan, d) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.
3. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C mengalami **kendala** seperti: a) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket C yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, b) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU. Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C dengan memberikan **solusi**: a) memilih dan memberdayakan PKBM dan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan b) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU.
4. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) desa Desa Vokasi dan BOP Kampung Literasi mengalami beberapa **kendala** yang sama seperti: a) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi b) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat, c) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program desa Vokasi dan kampung literasi. Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dengan memberikan **solusi**, sebagai berikut: a) mengadakan sosialisasi terhadap steak holder terhadap pemahaman program pemberdayaan desa vokasi b)

pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan c)
Melaksanakan pemdampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan,
agar memahami dan bisa melaksanakan program pemberdayaan desa
vokasi dan kampung literasi sesuai juknis.

5. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF mengalami beberapa **kendala** seperti: a) Belum seluruhnya PKBM mengajukan Akreditasi PKBM, b) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU. Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Penataan Kelembagaan Satuan PNF dengan memberikan beberapa **solusi**: a) Melakukan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi terhadap 550 pimpinan PKBM untuk melakukan pengisian instrumen akreditasi dan studi lapangan guna mendapatkan gambaran yang konkrit lembaga yang bermutu (terakreditasi), Bimbingan Teknis ini menghadirkan langsung BAN PAUD-PNF, asesor akreditasi, lembaga yang menjadi rujukan dan menjadi rujukan dan narasumber yang relevan, b) memberikan bantuan sarana bagi lembaga yang terakreditasi dan memiliki komitmen untuk menjadi lembaga yang bermutu dengan mengikuti akreditasi sebagai bentuk perhatian pemerintah (Bindiktara) terhadap PKBM yang sungguh-sungguh memperjuangkan lembaganya menjadi semakin bermutu (Akreditasi). Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan 18 IKK tersebut, dialokasikan anggaran Rp. 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Selama satu tahun 2016 ini, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 daya serap keuangan sebesar Rp 516.801.299.603,- (lima ratus enam belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam tiga rupiah) atau capaian kinerja sebesar 85,06%, ketidak tercapaian realisasi anggaran disebabkan **self blocking sebesar Rp.83.149271.000,-** dari anggararan Rp.607.578.441.000,- menjadi Rp.524.429.170.000,-.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%. Hal ini terjadi karena realisasi untuk seluruh jenis belanja tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan uang makan. Sebagai akibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi di Direktorat Bindiktara maka uang makan pegawai tidak terserap 100%.
2. Belanja Barang, adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengundang mitra dari daerah, dikarenakan: a) biaya/harga perjalanan maupun akomodasi dibayarkan berdasarkan ad cost dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu dan/atau b) tidak seluruh peserta yang diundang hadir mengikuti kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai alasan.
3. Belanja Modal, adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran.
4. Bansos, adanya retur pada pencairan dana yang disebabkan rekening lembaga tidak aktif.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan merupakan bagian dari program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam masyarakat karena sifatnya yang luwes dalam penyelenggaraannya. Pendidikan nonformal dapat berperan sebagai layanan pendidikan alternatif dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Kesetaraan adalah masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami *drop out* pada pendidikan formal, masyarakat yang tidak terlayani di pendidikan formal seperti: suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar, serta kaum perempuan yang termarginalkan. Oleh karena itu Direktorat Bindiktara mengangkat isu strategis: "Pendidikan Peduli Kaum Miskin dan Perempuan Marginal"

Ada nilai lebih dari pendidikan nonformal, yaitu setiap pembelajaran pada setiap tingkatan diberikan vokasi yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi orang dewasa berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal yang sesuatu hal tidak terlayani pada jalur pendidikan formal.

Perubahan, pengembangan dan perluasan strategi pembelajaran memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki

akses kepada pendidikan formal maupun mereka yang *drop out* dari pendidikan formal.

Proses pembangunan menuntut partisipasi jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal (persekolahan) yang ada tidak mampu mengakses permasalahan-permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Di daerah-daerah tertentu sejumlah penduduk menemukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dan gamblang dalam masyarakat teknologis.

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem-sistem formal terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan keterampilan vokasi yang diberikan ternyata mampu mewujudkan penyediaan layanan pendidikan yang strategis dan fungsional bagi masyarakat.

Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di antaranya adalah: Masyarakat ikut membangun pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar kegiatan belajar lain, magang, Kejar Usaha Produktif, Pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada santri tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama akan tetapi sudah mulai bergeser pada pendidikan umum, dan keterampilan wirausaha sebagai bekal hidup dan kehidupannya di masyarakat.

Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) memberikan nuansa baru dan ruh pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini dicermati sebagai suatu wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat. Iklim tersebut mendorong terbukanya kesempatan setiap orang, organisasi dan institusi sosial, industri dan masyarakat untuk belajar lebih luas; tumbuhnya semangat dan motivasi untuk belajar mandiri (*independent learning*) untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hayat, dan memperkuat

keberdaya-didikan (*educability*) masyarakat agar selalu mendidik diri dan masyarakat di lingkungannya, adalah merupakan sisi positif dari lahirnya konsep- konsep yang mendasari pendidikan non-formal dalam membangun kemandirian bangsa.

Ciri masyarakat mandiri dapat dipahami dari tumbuhnya masyarakat gemar belajar, dan masyarakat yang mampu menciptakan berbagai peluang (pendidikan non-formal) di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai potensi, keterampilan dan kecakapannya.

Sebagai upaya membelajarkan masyarakat sepanjang hayat, dan memberdayakan kaum miskin dan perempuan marginal, tahun 2016 ini Direktorat Bindiktara meluncurkan program terobosan yang bertajuk Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M). Program GIM ditujukan kepada masyarakat luas untuk menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca. Program GP3M ditujukan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga berusia 15-45 tahun yang termarginalkan, miskin, dan berpendidikan rendah khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. dan GIM dan GP3M merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat utamanya melalui pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

Manfaat GIM dan GP3M diharapkan nantinya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khususnya perempuan marjinal dari berbagai aspek. Untuk itu GIM dan GP3M didukung dengan program pendidikan kecakapan hidup perempuan, pembinaan untuk daerah yang angka putus sekolah tinggi, dan daerah-daerah rawan trafficking serta buruh migran dan memberikan program pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

Melalui GIM dan GP3M diharapkan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan pendidikan bagi kaum miskin melalui program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Untuk mendukung keberhasilan dan GIM maupun GP3M diselenggarakan pula Program Kampung Literasi dan Program Desa Vokasi. Program Kampung Literasi untuk mendukung keberhasilan GIM, sedangkan Program Desa Vokasi untuk mendukung keberhasilan GP3M,

Kampung literasi merupakan model pembelajaran keaksaraan yang komprehensif, bukan sekadar belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga melakukan aktivitas lainnya seperti belajar ketrampilan bermatapencarian hingga belajar kesenian untuk meningkatkan kualitas hidup. Embrio kampung literasi bisa berupa taman baca masyarakat (TBM) yang di sana terdapat aktivitas seperti kegiatan baca tulis, aktivitas budaya dan ketrampilan. Kampung literasi, bagian dari Gerakan Indonesia Membaca yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan minat baca dan menambah pengetahuan masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia yang buta aksara cukup besar yakni 5.769.270 jiwa atau 3,44 persen dari jumlah penduduk. Angka ini harus terus diupayakan turun. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang didukung GIM dengan TBM dan kampung literasi merupakan upaya yang diharapkan akan berhasil menurunkan angka buta aksara yang lebih rendah/kecil.

Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra keterampilan bermatapencarian, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 1/U/2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
6. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019.
7. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2019.
8. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bindiktara Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat tentang pencapaian target, daya serap anggaran, kendala dan masalah yang timbul, untuk segera diambil

langkah-langkan dan tindakan agar pelaksanaan program-kegiatan pada tahun depan (2017) berjalan dengan baik sehingga pada akhir tahun anggaran nendatang seluruh program dan target tercapai dengan baik.

2. Tujuan

Penyusunan LAKIP Direktorat Bindiktara Tahun 2016 ini bertujuan untuk:

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan untuk tahun yang akan datang.
- c. mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala pelaksanaan program-kegiatan.
- d. memberikan informasi akurat mengenai akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara,
- e. meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-kegiatan yang merata, bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.
- f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya sehingga kegiatan penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- g. melaksanakan analisis pelaksanaan program-kegiatan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun *output*, *outcome* dan *impact* bagi kehidupan masyarakat.
- h. mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.
- i. bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Permasalahan Strategis yang dihadapi Direktorat Bindiktara

Direktorat Bindiktara mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bindiktara yang dipimpin oleh seorang Direktur melaksanakan 9 fungsi, salah satu fungsi yang berkaitan erat dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas maka timbul berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan/kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*);
2. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dan Paket B mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti:
 - a) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Binakstara, b) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket A yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, c) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.
3. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C mengalami permasalahan/kendala seperti: a) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket C yang diminta dengan data yang

diajukan dalam proposal, b) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

4. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dan BOP Kampung Literasi mengalami beberapa permasalahan/kendala yang sama seperti: a) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi b) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat, c) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program desa Vokasi dan kampung literasi.
5. Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF mengalami beberapa permasalahan/kendala seperti: a) Belum seluruhnya PKBM mengajukan Akreditasi PKBM, b) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

E. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, Pasal 305-324 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:

- Direktorat Bindiktara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bindiktara yang dipimpin oleh seorang Direktur melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- 3) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 4) fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 5) fasilitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
- 9) pelaksanaan administrasi Direktorat;

Direktur Bindiktara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh empat pejabat eselon III dan sembilan pejabat eselon IV,

Empat pejabat eselon III, yaitu: 1) Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca, 3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan, dan 4) Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.

Sedangkan 9 pejabat eselon IV, terdiri dari 8 Kepala Seksi dan 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu: 1) Kepala Seksi Penyusunan Program, 2). Kepala Seksi Evaluasi Program 3). Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan, 4). Kepala Seksi Budaya Baca, 5) Kepala Seksi Pendidikan Kesenjangan, 6). Kepala Seksi Pendidikan Berkelanjutan, 7) Kepala Seksi Kelembagaan 8). Kepala Seksi Kemitraan, dan 9). Kepala Subbagian Tata Usaha.

b. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Program dan Evaluasi:

- Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 3) Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - 4) Penyusunan bahan dan fasilitas pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; dan
 - 6) Penyusunan laporan Direktorat.

c. Tugas Seksi Program:

Seksi Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

d. Tugas Seksi Evaluasi:

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta penyusunan laporan Direktorat.

e. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca:

- Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta budaya baca;
 - 2) Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan dan budaya baca;
 - 3) Penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan serta sarana dan prasarana budaya baca;
 - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca; dan
 - 6) Pelaksanan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan keaksaraan dan budaya baca.

f. Tugas Seksi Pendidikan Keaksaraan

Seksi Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan.

g. Tugas Seksi Budaya Baca

Seksi Budaya Baca mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana dan prasarana budaya baca.

h. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan:

- Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
 - 2) penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;

- 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan; dan
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

i. Tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan:

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana , evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan.

j. Tugas Seksi Pendidikan Berkelanjutan:

Seksi Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi penjaminan mutu kurikulum dan sarana dan prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang kurikulum dan sarana dan prasarana pendidikan Berkelanjutan.

k. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan:

- Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata

kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 3) penyusunan bahan fasilitasi pelaksana penjaminan mutu tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
 - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

l. Tugas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik:

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

m. Tugas Seksi Kemitraan:

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,

evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pendidikan kesetaraan dan kesetaraan.

n. Tugas Subbagian Tata Usaha:

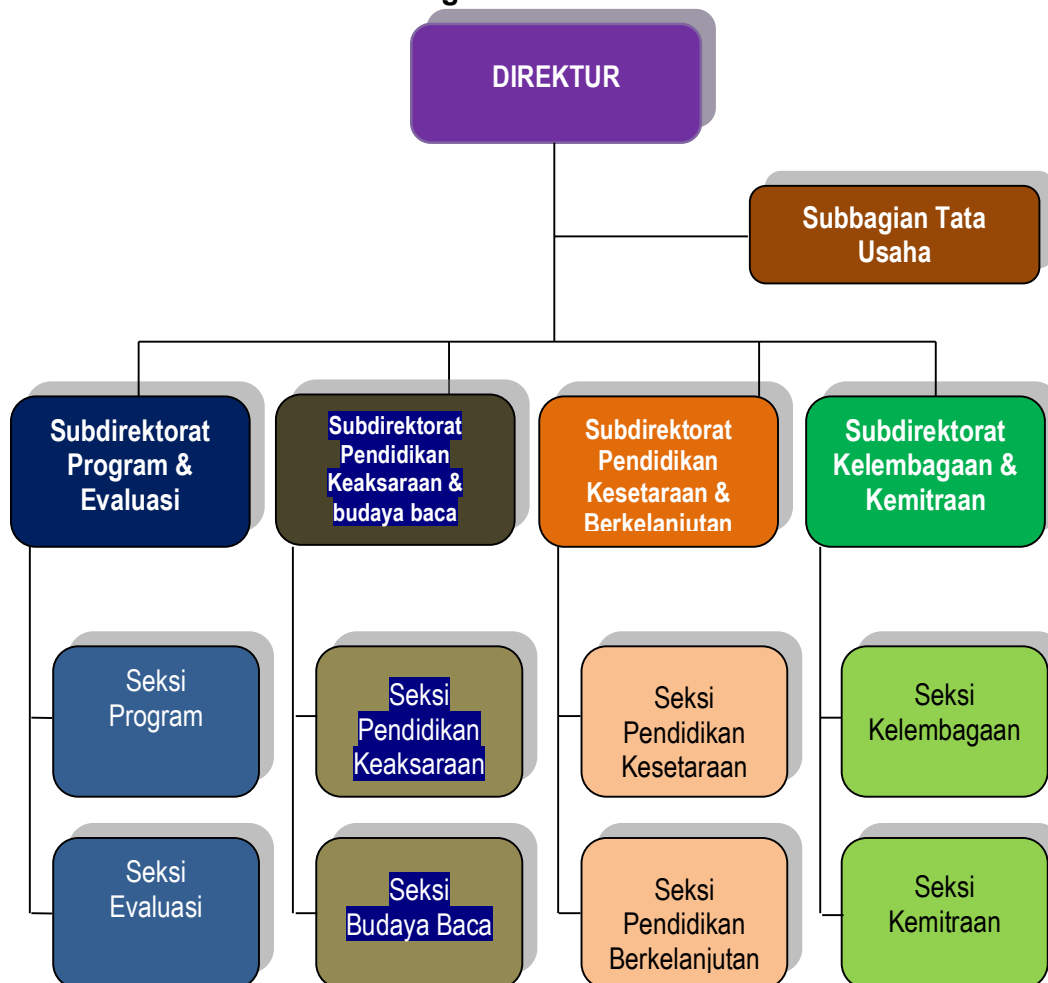
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan direktorat.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka, struktur atau bagan organisasi Direktorat Bindiktara dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

Struktur Organisasi Direktorat Bindiktara



F. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bindiktara didukung oleh pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Direktur	II	1 orang
2.	Kepala Subdirektorat	III	4 orang
3.	Kepala Seksi	IV	8 orang
4.	Kepala Subbagian	IV	1 orang
5.	Fungsional Umum	-	60 orang
6.	Tenaga Lepas	-	28 orang
Jumlah			102 orang

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3	3 orang
2.	Strata 2	11 orang
3.	Strata 1/Diploma IV	70 orang
4.	SMA dan sederajat	18 orang
Jumlah		102 orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	57 orang
2.	Perempuan	45 orang
Jumlah		102 orang



PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota” yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam Unit Kerja yang sama dan instansi terkait. Direktur Bindiktara selaku pucuk pimpinan, memiliki tanggung jawab untuk mencapai target-target sebanyak 18 Indikator Kinerja (IKK). Bentuk tanggung jawab tersebut ditunjukkan oleh diadakannya melalui penandatanganan perjanjian kinerja antara Direktur Bidikaksatara dengan Direktur Jenderal Paud dan Dikmas selaku atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Tahun 2016, merupakan komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas selaku pemberi amanah dengan Direktur Bindikakstara selaku penerima amanah. Perjanjian kinerja dibuat untuk sebagai motivasi mewujudkan sasaran strategis melalui pencapaian target-target IKK yang ditetapkan dalam Renstra Kemmdikbud Tahun 2015 – 2019 dan pengelolaan anggarannya. Oleh karena itu, isi perjanjian kinerja mencakup sasaran strategis, IKK, output, sub output, komponen dan target-target yang harus dicapai serta anggaran yang mendukungnya yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari - Desember 2016

Sasaran Stragis tersebut didukung oleh 18 Indikatot Kinerja, dengan

rincian, sebagai berikut: 1) tiga belas Indikator Kinerja didukung 13 Output, 2) dua Indikator Kinerja didukung 2 Komponen dan, 3) tiga Indikator Kinerja didukung 0 output (lampiran 1).

Dibawah ini kami uraikan ke-18 Indikator tersebut beserta pendukungnya, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja "Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar" dengan taget 65.950 orang dan anggaran Rp. 45.871.338.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar" dengan target dan anggaran yang sama;
2. Indikator Kinerja "Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A" dengan taget 59.000 orang dan anggaran Rp. 41.758.306.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri" dengan target dan anggaran yang sama;
3. Indikator Kinerja "Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional" dengan taget 11.000 orang dan anggaran Rp. 12.540.000.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)" dengan target dan anggaran yang sama;
4. Indikator Kinerja "Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa paket B yang menerima bantuan operasional" dengan taget 93.986 orang dan anggaran Rp. 134.149.769.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)" dengan target dan anggaran yang sama;
5. Indikator Kinerja "Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional" dengan taget 144.800 orang dan anggaran Rp. 205.831.144.100,- didukung oleh 1 output yaitu: "Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional" dengan target dan anggaran yang sama, dan 2 Sub Output yaitu: (a) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C dengan target

- 97.600 orang dan anggaran Rp. 168.753.838.000,- (b) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional” dengan target 17.200 orang dan anggaran Rp. 37.077.603.000,-
6. Indikator Kinerja ”Jumlah Komunitas sekolah (Homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)” dengan target 0 lembaga dan anggaran Rp. 0,- didukung 0 output;
 7. Indikator Kinerja ”Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi” dengan target 20 desa dan anggaran Rp. 3.705.345.000,- didukung oleh 1 output yaitu: “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi” dengan target dan anggaran yang sama;
 8. Indikator Kinerja ”Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi” dengan target 31 desa dan anggaran Rp. 4.273.365.000,- didukung oleh 1 output yaitu: “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi” dengan target dan anggaran yang sama;
 9. Indikator Kinerja ”Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan” dengan target 10.000 orang dan anggaran Rp. 17.915.190.000,- didukung oleh 1 output yaitu: “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi” dengan target dan anggaran yang sama;
 10. Indikator Kinerja ” Jumlah PKBM pembina dan Rumah Pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota” dengan target 0 lembaga dan anggaran Rp. 0,- didukung 0 output;
 11. Indikator Kinerja ”Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM” dengan target 329 lembaga dan anggaran Rp. 36.824.494.000,- didukung oleh 1 output yaitu: “Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat” dengan target dan anggaran yang sama, dan 2 Komponen yaitu: (a) Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF dengan target 299 lembaga dan anggaran Rp. 35.324.494.000,- (b) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional” dengan target 30 lembaga dan anggaran Rp. 1.500.000.000,-;
 12. Indikator Kinerja ” Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat” dengan target 100 lembaga dan anggaran

- Rp. 5.000.000.000,- didukung oleh 1 komponen yaitu: "Bantuan sarana TBM" dengan target dan anggaran yang sama;
13. Indikator Kinerja "Jumlah TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan SKB" dengan target 0 lembaga dan anggaran Rp. 0,- didukung 0 output;
14. Indikator Kinerja "Satuan pendidikan SKB memperoleh revitalisasi kelembagasan dikmas" dengan target 20 lembaga dan anggaran Rp. 47.672.784.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan" dengan target dan anggaran yang sama;
15. Indikator Kinerja "Jumlah satuan pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran dikmas" dengan target 167 lembaga dan anggaran Rp. 14.350.000.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat" dengan target dan anggaran yang sama, dan 2 Komponen yaitu: (a) Bantuan Sarana SKB dengan target 120 lembaga dan anggaran Rp. 12.000.000.000,- (b) Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB dengan target 47 lembaga dan anggaran Rp. 2.350.000.000,-;
16. Indikator Kinerja "Jumlah NSPK Pendidikan Masyarakat" dengan target 19 naskah dan anggaran Rp. 1.528.057.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat" dengan target dan anggaran yang sama;
17. Indikator Kinerja "Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana" dengan target 2 dokumen dan anggaran Rp. 5.321.930.000,- didukung oleh 1 output yaitu: "Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana" dengan target dan anggaran yang sama, dan 2 Sub Output yaitu: (a) Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat dengan target 1 dokumen dan anggaran Rp. 1.679.815.000,- (b) Dokumen Evaluasi Kebijakan" dengan target 1 dokumen dan anggaran Rp. 3.642.115.000,-;
18. Indikator Kinerja "Jumlah dokumen Penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi" dengan target 1 dokumen dan anggaran Rp. 2.958.658.000,-

didukung oleh 1 output yaitu: “Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional” dengan target dan anggaran yang sama.

B. Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis “Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota” didukung oleh 18 Indikator Kinerja, dengan rincian, sebagai berikut: 1) tiga belas Indikator Kinerja didukung 13 Output, 2) dua Indikator Kinerja didukung 2 Komponen dan, 3) tiga Indikator Kinerja didukung 0 output. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja 1 sampai dengan Perjanjian Kinerja 3 (lampiran 2) antara Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Untuk melihat kronologis dari Perjanjian Kinerja tersebut diatas, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
PERKEMBANGAN ANGGARAN
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Dari Perjanjian Kinerja 1 –Perjanjian Kinerja 3
Tahun 2016

No	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran	Anggaran yang diKontrak Kinerjakan	Anggaran yang tidak diKontrak Kinerjakan	Pemotongan Anggaran	%
1	Perjanjian Kinerja 1	Rp 717,270,000,000	Rp 610,499,444,000	Rp 106,770,556,000	Rp -	
2	Perjanjian Kinerja 2	Rp 607,578,441,000	Rp 443,902,888,400	Rp 163,675,552,600	Rp 109,691,559,000	15.29%
3	Perjanjian Kinerja 3	Rp 607,578,441,000	Rp 565,350,677,000	Rp 42,227,764,000	Rp 83,149,271,000	13.69%
Total Pemotongan Anggaran					Rp 192,840,830,000	26.89%

1. Bahwa anggaran yang dialokasi oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai Kontrak Kinerjakan 1 yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tanggal 30 Juni 2016 sebesar RP.

610.499.444.000,- dari total anggaran yang yang tertera pada DIPA 01 sebesar Rp. 717.270.000.000,-, maka terdapat anggaran sebesar Rp. 106.770.556.000,- yang tidak dikontrak kinerjakan.

2. Besarnya anggaran yang dialokasi oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai Kontrak Kinerjakan 2 yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2016 sebesar RP. 443.902.888.400,- dari total anggaran yang yang tertera pada DIPA 02 sebesar Rp. 607.578.441.000,-, maka terdapat anggaran sebesar Rp. 163.675.552.600,- yang tidak dikontrak kinerjakan. Apabila disandingkan dengan total anggaran yang tertera dalam DIPA 01 maka akan terlihat besarnya pemotongan anggaran sebesar Rp. 109.691.559.000,- atau setara dengan 15,29%.
3. Sedangkan besarnya anggaran yang dialokasi oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, sesuai Kontrak Kinerjakan 3 yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat tanggal 3 November 2016 sebesar RP. 565.350.677.000,- dari total anggaran yang yang tertera pada DIPA 04 sebesar Rp. 607.578.441.000,-, maka terdapat anggaran sebesar Rp. 42.227.764.000,- yang tidak dikontrak kinerjakan. Apabila disandingkan dengan total anggaran yang tertera dalam DIPA 02 maka akan terlihat besarnya self blocking sebesar Rp. 83.149.271.000,- atau setara dengan 13,69%. Sedangkan apabila disandingkan dengan total anggaran yang tertera dalam DIPA 01 maka akan terlihat besarnya pemotongan anggaran dan self blocking sebesar Rp. 109.691.559.000,- atau setara dengan 26,89%.

Sedangkan target anggaran berdasarkan berdasarkan jenis belanja Direktorat Bindiktara tahun 2016, dapat dilihat seperti tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2016

NO	JENIS BELANJA	TARGET	%
1	Belanja Pegawai	Rp 5,033,873,000	0.83
2	Belanja Barang	Rp 600,965,568,000	98.91
3	Belanja Modal	Rp 779,000,000	0.13
4	Bansos	Rp 800,000,000	0.13
TOTAL		Rp 607,578,441,000	100

C. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar lebih terarah Direktorat Bindiktara menetapkan visi, misi, dan kebijakan mutu yang diarahkan untuk mendukung mewujudkan cita-cita luhur pembangunan pendidikan nasional.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi yang hendak diwujudkan oleh Direktorat Bindiktara, yaitu:
"Terbentuknya Pelaku Serta Ekosistem Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Keseneteraan Yang Berkarakter Dengan Dilandasi Semangat Gorong Royong"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

Penguatan pelaku pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, peningkatan mutu dan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, melalui layanan:

- 1) Pendidikan keaksaraan,
- 2) Pengembangan budaya baca,
- 3) Pendidikan kesetaraan,

- 4) Pendidikan berkelanjutan (pendidikan pemberdayaan perempuan), dan
- 5) Peningkatan penataan kelembagaan dan kemitraan.

2. Kebijakan Mutu

Dalam rangka memberikan layanan prima terhadap pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, Direktorat Bindikastara menetapkan kebijakan mutu, yaitu: Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang merata dan bermutu bagi peserta didik melalui kinerja Direktorat Bindiktara yang dibuktikan dengan:

- a. Dedikasi, yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan
- b. Inovasi, yang cerdas dalam mengembangkan program
- c. Komitmen, yang kuat untuk memberdayakan masyarakat
- d. Mutu, layanan yang prima dalam pengabdian terbaik
- e. Agenda, program dan kegiatan yang pasti dan bermakna
- f. Sinergitas, yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi program.

D. Kebijakan dan Program

1. Arah Kebijakan

Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan merupakan salah satu Program Pendidikan Nonformal yang merupakan proses pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih bermanfaat, sehingga layanan program lebih diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan keaksaraan dikembangkan dalam rangka memberikan layanan pendidikan khususnya bagi penduduk tuna aksara. Mengingat sekitar 70% penduduk niraksara dewasa adalah perempuan dan

sebagian dari mereka berusia di atas 45 tahun, maka pendidikan keaksaraan perlu diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengembangan budaya baca.

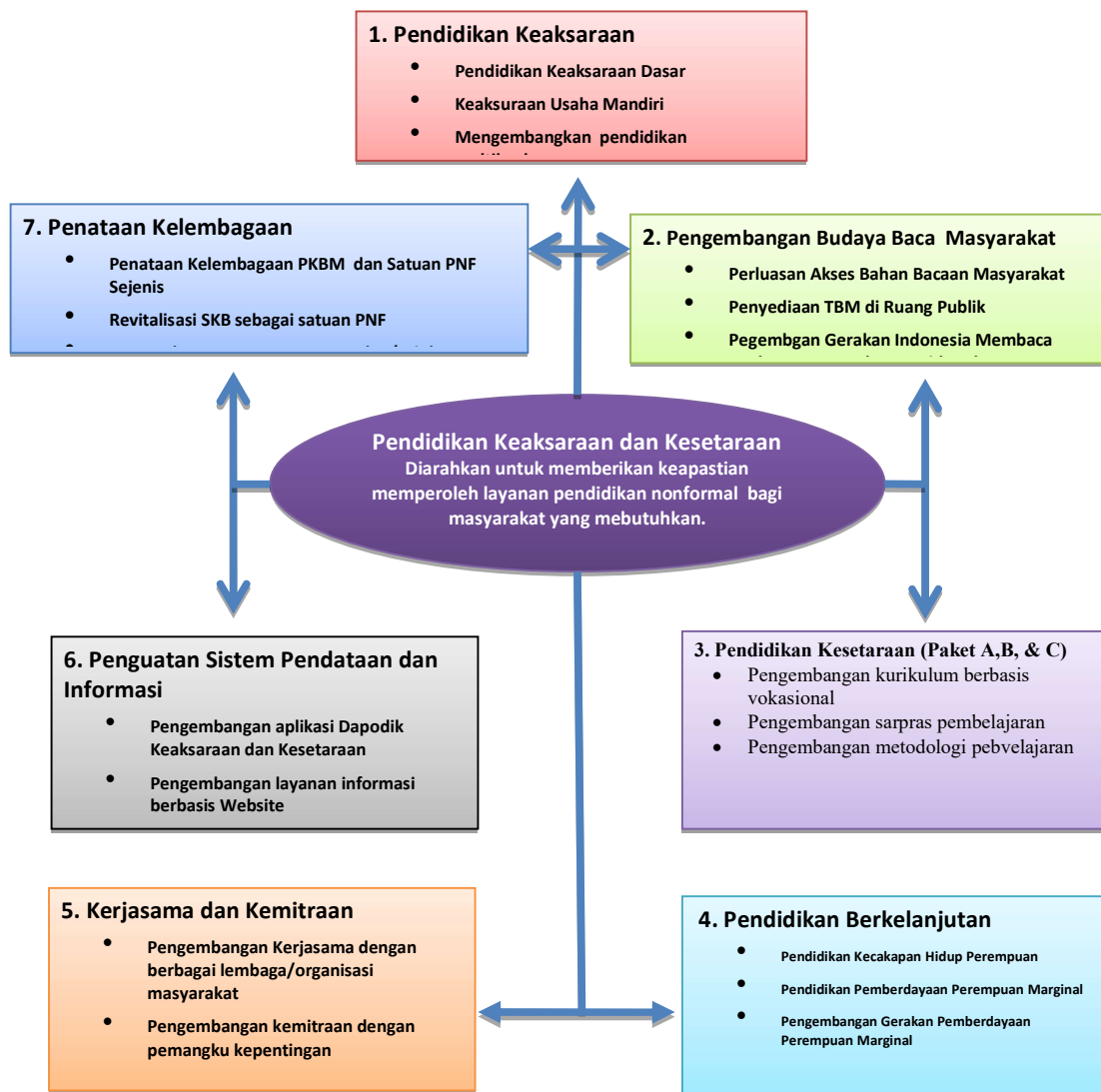
Untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa sekaligus untuk meningkatkan budaya baca dengan mulai tahun 2015 dilaksanakan program terobosan, yaitu “Gerakan Indonesia Membaca”, maka program pendidikan keaksaraan di sinergikan dengan perluasan akses terhadap ketersediaan bahan-bahan bacaan di taman bacaan masyarakat (TBM) pada tingkat desa, serta diperluas diruang publik.

Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2015 Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) dialihkan pengelolaan dan pembiayaannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas, yaitu pada Direktorat Bidikastara. Menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan putus lanjut di tingkat SD sampai dengan SMA atau sederajat, maka program pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pendidikan saat ini, khususnya dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.

Pendidikan berkelanjutan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup perempuan sebagai bagian terbesar dari sasaran Program Pendidikan Keaksaraan melalui pelatihan keterampilan praktis yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan beraksara dan berusaha mandiri dengan keterampilan bermata pencaharian. Melalui sinergi dan integrasi Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan berbagai Program Pendidikan Keterampilan, diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berakarakter, beraksara, berbudaya baca, responsif gender, dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, arah kebijakan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dikembangkan secara terpadu melalui sinergi dan integrasi program yang saling mendukung seperti tergambar dalam Gambar 2.

Gambar 2
Kebijakan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bindikastara tahun 2016 dialokasikan dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Direktorat Bindikastara Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas Nomor: SP DIPA-023.05.1.666866/2016 Revisi ke 04

tanggal 06 November 2016 sebesar Rp. 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Alokasi Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Bagian
Tahun 2016

NO	BAGIAN	TARGET	%
1.	Subbag Tata Usaha	Rp 19.515.984.000,-	3,21%
2.	Subdit Kemitraan dan Kelembagaan	Rp 92.394.226.000,-	15,21%
3.	Subdit Program dan Evaluasi	Rp 22.625.730.000,-	3,72%
4.	Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	Rp 371.049.397.000,-	61,07%
5.	Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca	Rp 101.993.104.000,-	16,79%
Total		Rp 607.578.441.000,-	100.00%

BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, bahwa pada tahun anggaran 2016 ini, Direktorat Bindiktara telah menetapkan satu sasaran strategis yang harus diwujudkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan ke dalam 18 Indikator Kinerja (IKK). Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pencapaian target-target dari 18 IKK tersebut melalui pengukuran dari pencapaiannya didukung dengan 1) tiga belas Indikator Kinerja didukung 13 Output, 2) dua Indikator Kinerja didukung 2 Komponen dan, 3) tiga Indikator Kinerja didukung 0 output. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara diukur melalui ketercapaian target IKK dengan melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. Pencapaian target IKK dinyatakan berhasil dengan baik jika pencapaian target $\geq 90\%$ dari yang ditetapkan diakhir tahun. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dari setiap IKK dengan target yang ditetapkan, baik ketercapaian secara fisik maupun keuangan.

Kinerja Direktorat Bindiktara tahun 2016 dapat dilihat dari pencapaian target IKK, hal ini menggambarkan pencapaian strategis dan tujuan organisasi. Pencapaian tersebut yang merupakan manifestasi dari realisasi pencapaian indikator kinerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan hambatan yang timbul dan dihadapi dalam melaksanakan komponen untuk mencapainya. Sampai 31 Desember 2016 ini, secara umum kinerja Direktorat Bindiktara sudah akuntabel, hal ini ditunjukkan oleh capaian target secara fisik dari setiap 18 IKK, sebagai berikut: (1) yang mencapai 100% ada 7 IKK (2) yang kurang dari 100% ada 11 IKK dari target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap indikator kinerja, berikut disampaikan ketercapaian indikator kinerja layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang diukur/dilihat dari ketercapaian masing-masing indikator kinerja secara fisik sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1: Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar

Yang dimaksud usia dewasa disini adalah usia 15 – 59 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target fisik dan realisasinya.

Bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 target **IKK** “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar” telah **dapat** dicapai 97,47%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking sebanyak 1.670 orang** (dari target 65.950 orang menjadi 64.280 orang).

Perealisasi IKK ini **didukung oleh output** “Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar”, yang sampai dengan akhir tahun 2016 ini telah dapat menyalurkan untuk pembelajaran sebanyak 64.280 orang. Dengan telah dibelajarkannya 64,280 orang tersebut maka jumlah penduduk buta aksara 5.833.550 orang atau 3,61% tahun 2015 berkurang menjadi 5.769.270 orang atau 3,44% tahun 2016 ini.

Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Penduduk tuna aksara yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dasar tersebut mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Capaian angka penurunan tuna aksara sebanyak 64.280 orang diperoleh melalui dukungan APBN. Apabila ditambah dengan dukungan APBD I maupun APBD II, angka niraksara penduduk dewasa tersebut diperkirakan lebih kecil.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung melalui strategi pelaksanaan sistem block, yaitu memberikan afirmasi bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif, seperti di Papua dan Papua Barat.

Berikut tren penduduk tuna aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun sampai dengan tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.

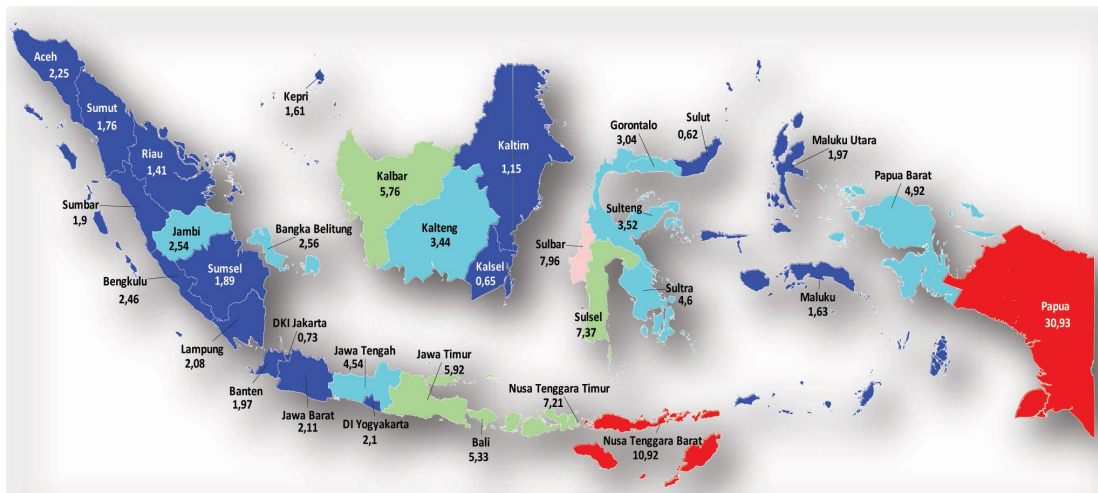
Gambar 3

Tren Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun 2010-2016



Sumber data: BPS dan Direktorat Bindiktara, 2015

Gambar 4
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Niraksara tahun 2015



Sumber: BPS dan Kemdikbud, 2015

Usaha menurunkan penduduk tuna aksara, selama tahun 2016 menemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya adalah: (1) Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*); dampak dari kendala nomor (1) berpengaruh pada pengurangan target anggaran dalam DIPA; (2) penyaluran bantuan ke lembaga menjadi lebih sedikit dari target yang ditetapkan dan (3) terdapat satu kabupaten (Kab. Asmat) yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 tercapai adalah: (1) minta pengarahan dari pimpinan; (2) memaksimalkan target satuan walaupun dengan anggaran yang tersedia; (3) mengutamakan daerah 3T dalam penyaluran

bantuan meskipun dana terbatas, (4) mengalihkan kuota bagi kabupaten yang tidak bisa mengakses bantuan akan dialihkan ketempat lain.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Rencana Strategia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) Tahun 2015-2019 capaian kinerjanya sebesar 42,70% dikarenakan hanya mampu membelajarkan 64,280 orang dari target 150.125 orang, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menurunkan target Renstra Kemdikbud, dikarenakan target Renstranya sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi penurunan target Renstranya pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebanyak 64.280 orang.

Indikator Kinerja 2 :

Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” telah dapat dicapai 98,20%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh *self blocking* sebanyak 1.060 orang** (dari target 59.000 orang menjadi 57.940 orang).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri, yang telah mampu merealisasikan bantuan untuk membelajarkan 57.940 orang dari target 59.000 orang.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran dana bantuan KUM dengan sistem kuota untuk setiap provinsi dan dinas pendidikan provinsi membantu pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi, menerima dan menilai proposal, melakukan verifikasi lembaga, dan mengusulkan lembaga penerima bantuan KUM ke Direktorat Bindiktara.

KUM merupakan program penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan bermatapencarian.

Berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 150.125 orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 95.200 orang.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Renstra Kemdikbud maka capaian kinerjanya sebesar 60,86% walaupun mampu membelajarkan 57.940 orang dari target 95.200 orang, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menurunkan target Renstra, dikarenakan target Renstra tersebut sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi penurunan target Renstra pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebanyak 57.940 orang.

Indikator Kinerja 3 :

Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional.

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” telah **dapat** dicapai 86,36%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking sebanyak 1.500 orang** (dari target 11.000 orang menjadi 9.500 orang).

Perealisasi ini didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 9.500 orang dari target 11.000 orang.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Binakstara, 2) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket A yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket A dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU dan, 4) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) tahun 2015-2019 sebanyak 3.140 orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 11.000 orang.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Renstra Kemdikbud maka capaian kinerjanya sebesar 302,04% dengan telah mampu membelajarkan 9.500 orang dari target 3.140 orang, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menaikkan target Renstra Kemdikbud, dikarenakan target Renstra tersebut sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi target Renstra pada 2017 sekurang-kurangnya sama dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2016 yaitu sebanyak 9.500 orang.

Indikator Kinerja 4 :

Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” telah dapat dicapai 76,11%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target sebanyak 22.457 orang** (dari 93.986 orang menjadi 71.529 orang).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 71.529 orang dari target 93.986 orang.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional”

berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 sebanyak 169.660 orang, sedangkan sasaran yang ada dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 93.986 orang. Jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” telah dapat dicapai 89,72%, yaitu melalui Direktorat Bindiktara sebanyak 71.529 orang, dan melalui dana APBD di 34 provinsi sebanyak 84.324 orang.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket B mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Bindiktara, 2) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket B yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU dan, 4) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket B dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket B, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU dan, 4) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.

Indikator Kinerja 5 :

Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional

Ketercapaian sasaran strategis Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target fisik dan realisasinya.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” berdasarkan Sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 144.800 orang.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” telah dapat dicapai 66,23%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target sebanyak 44.900 orang** (dari 144.800 orang menjadi 99.900 orang).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk membelajarkan 99.900 orang dari target 144.800 orang dan juga didukung oleh 2 Sub Output, yaitu (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C yang telah membelajarkan 78.700 orang dari 97.600 orang yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 80,64% dan, (2) membelajarkan 17.200 orang dari 17.200 orang yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 100%.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurang maksimalnya UPT PP-Paudni dan BP-Paudni dalam merespon sosialisasi dari Dit. Bindiktara, 2) ketidak sesuaian antara data warga belajar Paket C yang diminta dengan data yang diajukan dalam proposal, 3) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Dasar Paket C dengan: 1) melakukan sosialisasi melalui UPT PP-Paudni dan BP-Paudni, 2) memilih dan memberdayakan PKBM dan SKB sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan 3) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU dan, 4) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.

Adapun sasaran berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 407.070 orang, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 144.080 orang.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Renstra Kemdikbud maka capaian kinerjanya sebesar 23,56% walaupun telah membelajarkan 95.900 orang dari 144.080 orang yang ditargetkan, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menurunkan target Renstra Kemdikbud, dikarenakan target Renstra tersebut sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi penurunan target Renstra pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebanyak 95.900 orang.

Indikator Kinerja 6 : **Jumlah komunitas sekolah rumah** **(homeschooling) yang memperoleh bantuan** **operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)**

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)” dengan sasaran fisik sebanyak 0 lembaga maka persentase capaian kinerjanya 0%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 untuk output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (sasaran fisik 0 lembaga).

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan

operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)” berdasarkan Renstra Kemdikbud 2015-2019 sebanyak 35 lembaga, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 0 lembaga, dan sejak revisi DIPA 01 sampai dengan DIPA 04 bahwa output komunitas sekolah rumah (*homeschooling*) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR) sudah tidak ada lagi karena bukan merupakan program prioritas.

Indikator Kinerja 7 : Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi”** telah **dapat** dicapai 100%, yaitu terealisasi 20 desa dari 20 desa yang ditargetkan.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Jumlah Desa Melaksanakan Pemberdayaan Desa Vokasi”, yang telah mampu merealisasikan 20 desa dari target 20 desa.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi 2) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat, 3) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program desa Vokasi.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) sistim quota

yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara, 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan.

Akan tetapi direktorat memberikan beberapa solusi yang kami tawarkan, antara lain, sebagai berikut: 1) mengadakan sosialisasi terhadap stake holder terhadap pemahaman program pemberdayaan desa vokasi 2) pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan 3) Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program pemberdayaan desa vokasi sesuai juknis.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi” berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 68 lembaga, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 20 desa.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Renstra Kemdikbud maka capaian kinerjanya hanya sebesar 29,41% walaupun telah mampu melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi 20 desa dari target 20 desa, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menurunkan target Renstra, dikarenakan target Renstranya sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi target Renstranya pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2016 yaitu sebanyak 20 desa.

Indikator Kinerja 8 : Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi dapat dilihat melalui

pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi”** telah **dapat** dicapai 100% dari yang ditargetkan 31 lembaga dan terealisasi 31 lembaga.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi”, yang telah mampu merealisasikan 31 lembaga dari target 31 lembaga.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Kampung Literasi mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi 2) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat, 3) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program Kampung Literasi.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Kampung Literasi dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) sistim quota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Direktorat Bindiktara, 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan.

Akan tetapi direktorat memberikan beberapa solusi yang kami tawarkan, antara lain, sebagai berikut: 1) mengadakan sosialisasi terhadap stake holder terhadap pemahaman program pemberdayaan desa vokasi 2) pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan 3) Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program Kampung Literasi sesuai juknis.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi” berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 68 lembaga, sedangkan

sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 31 lembaga.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan sasaran strategis berdasarkan renstra Kemdikbud hasil capaian kinerjanya hanya sebesar 45,59% walaupun telah mampu melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi 31 desa dari 31 desa yang ditargetkan, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra Kemdikbud pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi, yaitu dengan menurunkan target Renstra Kemdikbud, dikarenakan target Renstra tersebut sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi target Renstranya pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2016 yaitu sebanyak 31 desa.

Indikator Kinerja 9 :

Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan”** telah **dapat** dicapai 100%. Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Perempuan Marginal Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut dengan membelajarkan 10.000 orang dari target 10.000 orang.

Keberhasilan ini oleh karena sejak awal BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini dalam pelaksanaan penyalurannya memiliki waktu yang cukup, yaitu sejak bulan April 2016, disamping itu banyak lembaga yang peduli

terhadap kecakapan perempuan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya proposal yang diterima di Direktorat Bindiktara.

Kecakapan Hidup Perempuan adalah pendidikan yang memberikan bekal dasar kecakapan sosial, personal, akademik, dan keterampilan kepada perempuan dewasa yang berkeaksaraan rendah.

Indikator Kinerja 10 : Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” dengan sasaran fisik sebanyak 0 lembaga maka persentase capaian kinerjanya 0%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 untuk output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (sasaran fisik 0 lembaga).

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 307 lembaga, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 0 lembaga, dan sejak revisi DIPA 01 sampai dengan terkenanya Self Blocking bahwa output “PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” sudah tidak ada lagi karena bukan merupakan program prioritas.

Indikator Kinerja 11:

Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM” telah dapat dicapai 85,11%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target sebanyak 49 lembaga (dari 329 lembaga menjadi 280 lembaga).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk menyalurkan bantuan kepada 280 lembaga dari target 329 lembaga dan juga didukung oleh 2 Komponen, yaitu (1) “Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF” dengan menyalurkan bantuan kepada 259 lembaga dari 299 lembaga yang ditargetkan atau telah tercapai 86,62% dan, (2) “Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra” dengan menyalurkan bantuan kepada 30 lembaga dari 30 lembaga yang ditargetkan atau telah tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF mengalami beberapa kendala seperti: 1) Belum seluruhnya PKBM mengajukan Akreditasi PKBM, 2) walaupun sudah mengikuti orientasi namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap salah dalam penandatanganan MoU. Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Penataan Kelembagaan Satuan PNF dengan: 1) Direktorat telah mendorong PKBM-PKBM untuk meningkatkan mutunya agar lembaga tersebut bersaing untuk mengikuti akreditasi, upaya yang dilakukan oleh Dit Bindiktara antara lain: (1) Melakukan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi terhadap 550 pimpinan PKBM untuk melakukan pengisian instrumen akreditasi dan studi lapangan

guna mendapatkan gambaran yang konkrit lembaga yang bermutu (terakreditasi), Bimbingan Teknis ini menghadirkan langsung BAN PAUD-PNF, asesor akreditasi, lembaga yang menjadi rujukan dan menjadi rujukan dan narasumber yang relevan, (2) memberikan bantuan sarana bagi lembaga yang terakreditasi dan memiliki komitmen untuk menjadi lembaga yang bermutu dengan mengikuti akreditasi sebagai bentuk perhatian pemerintah (Bindiktara) terhadap PKBM yang sungguh-sungguh memperjuangkan lembaganya menjadi semakin bermutu (Akreditasi). (3) upaya menjamin mutu ini tentunya terintegrasi dengan stakeholder yang terlibat dengan penjaminan mutu PKBM, yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Pendataan Data Pokok Pendidikan Masyarakat (DAPODIKMAS), BAN PAUD-PNF dan Dit Bindiktara serta UPT Pusat/BP PAUD-Dikmas di 8 regional. 1) melakukan orientasi teknis sekaligus melakukan MoU dan, 2) menurunkan Tim Buser Bansos yang disebar ke berbagai Kab/Kota.

Berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 545 lembaga, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 329 lembaga namun dengan berbagai upaya tersebut diatas yang telah dilaksanakan oleh Dit Bindiktara pada tahun 2016 telah merealisasikan akreditasi dari BAN-PAUD-PNF sebanyak 840 PKBM.

Dengan demikian apabila disandingkan dengan Renstra Kemdikbud maka capaian kinerjanya sebesar 154,31% capaian ini sudah termasuk menyalurkan bantuan kepada 280 orang dari target 329 lembaga, maka tidak menutup kemungkinan untuk target Renstra kemdikbud pada 3 tahun kedepan (2017-2019) alangkah baiknya untuk dapat direvisi yaitu dengan menaikkan target Renstra, dikarenakan target Renstra tersebut sudah tidak relevan.

Adapun besarnya revisi penurunan target Renstra pada 2017 sebanyak-banyaknya sama dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebanyak 840 lembaga.

Indikator Kinerja 12 : Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat” telah dapat dicapai 80% ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target sebanyak 20 lembaga (dari 100 lembaga menjadi 80 lembaga).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Bantuan Sarana TBM”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk menyalurkan bantuan kepada 80 lembaga dari target 100 lembaga.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Sarana TBM mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi 2) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang diberikan oleh Direktorat, 3) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program Pengadaan sarana TBM.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) sistim quota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Dit Bindiktara, 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga penerima bantuan Sarana TBM .

Akan tetapi direktorat memberikan beberapa solusi yang kami tawarkan, antara lain, sebagai berikut: 1) mengadakan sosialisasi terhadap steak holder

terhadap pemahaman program Bantuan Sarana TBM 2) pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan 3) Melaksanakan pemdampingan terhadap lembaga penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program Sarana TBM sesuai juknis.

Indikator Kinerja 13: Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB” dengan sasaran fisik sebanyak 0 lembaga maka persentase capaian kinerjanya 0%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 untuk output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (sasaran fisik 0 lembaga).

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 sebanyak 97 lembaga, sedangkan sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) sebanyak 0 lembaga, dan sejak revisi DIPA 01 sampai dengan terkenanya Self Blocking bahwa output PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota) sudah tidak ada lagi karena bukan merupakan program prioritas.

Indikator Kinerja 14 : Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas”** telah **dapat** dicapai 100% dari yang ditargetkan 20 lembaga dan terealisasi 20 lembaga.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan”, yang telah mampu merealisasikan 20 lembaga dari target 20 lembaga.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan mengalami beberapa **kendala** seperti: 1) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi 2) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi kuota yang diberikan oleh Direktorat, 3) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahamai secara benar tentang pelaksanaan program Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan penyaluran (BOP) Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan tidak terlepas dari berbagai solusi yang diambil oleh Direktorat antara lain: 1) mengadakan sosialisasi kepada stakeholder terhadap pemahaman juknis tentang program Revitalisasi SKB, 2) pengalihan kuota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan, 3) Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan sesuai juknis.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas” apabila dibandingkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 20 lembaga, dengan sasaran yang tercantum dalam sasaran

yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan Perjanjian Kinerja sebanyak 20 lembaga, maka terjadi pencapaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja 15 :

Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas”** telah **dapat** dicapai 88,02% dengan merealisasikan 167 lembaga dan 147 lembaga yang ditargetkan, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target sebanyak 20 lembaga (dari 167 lembaga menjadi 147 lembaga).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat” yang telah mampu merealisasikan 147 lembaga dari 147 lembaga yang ditargetkan, dan 2 Komponen (1) “Bantuan Sarana SKB” merealisasikan 100 lembaga dari 120 lembaga yang ditargetkan dan (2) “Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB ”, merealisasikan 47 lembaga dari 47 lembaga yang ditargetkan.

Dalam pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Sarana SKB dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB mengalami beberapa kendala seperti: 1) kurangnya pemahaman lembaga terhadap juknis mengakibatkan proposal yang masuk tidak lolos dalam seleksi administrasi 2) sebagian Dinas Kab/Kota tidak dapat memenuhi quota yang

diberikan oleh Direktorat, 3) walaupun sudah MoU namun masih ada sebagian ketua lembaga yang tetap belum memahami secara benar tentang pelaksanaan program tersebut.

Keberhasilan ini oleh karena pelaksanaan penyaluran (BOP) Bantuan Sarana SKB dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB dengan: 1) banyaknya proposal yang diterima oleh Direktorat Bindiktara sejak awal-awal tahun 2) sistem quota yang diberikan kepada Dinas Pendidikan kab/Kota untuk mengajukan proposal ke Dit Bindiktara, 3) melaksanakan pendampingan terhadap lembaga penerima bantuan.

Akan tetapi direktorat memberikan beberapa solusi yang kami tawarkan, antara lain, sebagai berikut: 1) mengadakan sosialisasi terhadap stake holder terhadap pemahaman program pemberdayaan desa vokasi 2) pengalihan quota ke Kab/Kota yang lebih mampu dan lebih membutuhkan 3) Melaksanakan pendampingan terhadap lembaga/desa penerima bantuan, agar memahami dan bisa melaksanakan program Bantuan Sarana SKB dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB sesuai juknis.

Perlu diinformasikan bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas” apabila dibandingkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 68 lembaga, dengan sasaran yang tercantum dalam sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan Perjanjian Kinerja sebanyak 147 lembaga, maka terjadi pencapaian kinerja 216,17%.

Indikator Kinerja 16:

Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” dapat mencapai 100%.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat” yang telah dapat dicapai 100% merealisasikan 19 lembaga dari 19 lembaga yang ditargetkan

Namun demikian, apabila disandingkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 15 lembaga, dengan sasaran yang tercantum dalam sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan Perjanjian Kinerja sebanyak 19 lembaga, maka terjadi pencapaian kinerja 126,67%.

Keberhasilan dalam merealisasikan target ini dengan memberdayakan para ahli dibidangnya baik akademisi dan praktisi sehingga mampu merealisasikan 19 naskah NSPK .

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan seiring dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, terhadap layanan pendidikan nonformal khususnya layanan pendidikan keaksaraan, maka pada tahun 2016 ini perlu disusun NSPK yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam melaksanakan/menyelenggarakan program.

. Indikator Kinerja 17:

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” dapat dilihat

melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” telah **dapat** mencapai 100%.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” yang telah mampu merealisasikan 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan dan 2 Sub Output (1) “Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat” merealisasikan 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan dan (2) “Dokumen Evaluasi Kebijakan”, merealisasikan 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan.

Dengan demikian, apabila disandingkan Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019 sebanyak 2 dokumen, dengan sasaran yang tercantum dalam sasaran yang ada dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 dokumen, maka terjadi pencapaian kinerja 100%.

. Indikator Kinerja 18:

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apreasiasi” telah mencapai 100%, terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan.

Perealisasinya didukung oleh 1 Komponen “Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional” telah dapat mencapai 100% terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan, melalui pelaksanaan

kegiatan peringatan hari aksara internasional dengan melakukan berbagai lomba dan apresiasi oleh lembaga PNF dan tokoh.

Terwujudnya sasaran strategis dapat diketahui melalui ketercapaian target-target dari 18 IKK yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program-kegiatan. IKK yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu satu tahun. Penetapan IKK ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, dan kemampuan anggaran. Oleh karena itu, perjanjian kinerja dibuat tidak terlepas dari rencana kerja dan anggaran (RKAKL) Direktorat Bindiktara 2016.

B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Direktorat

Anggaran penyediaan layanan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016 yang di alokasikan pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebesar Rp 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dengan membandingkan antara target dengan realisasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran, perjanjian kinerja dan anggaran yang tidak dikinerjakan dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

**Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Anggaran Pagu, Perjanjian Kinerja, dan
Anggaran yang tidak di Perjanjian Kinerjakan
Tahun 2016**

NO	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pagu	Rp 607.578.441.000,-	Rp 516.801.299.603,-	85,06
2	Perjanjian Kinerja	Rp 565.350.677.000,-	Rp 479.129.004.007,-	84,75
3	Yang tidak di Perjanjian Kinerjakan	Rp 42.227.764.000,-	Rp 37.672.295.596,-	89,21

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, yaitu: 1 Januari - 31 Desember 2016. secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu: 1) Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 516.801.299.603,- (lima ratus enam belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dari alokasi anggaran sesuai **pagu** sebesar Rp 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) **dengan persentase capaian kinerja 85.06%, ketidak tercapaian realisasi anggaran disebabkan self blocking sebesar Rp. 83.149.271.000,- (delapan puluh tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),** 2) Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 479.129.004.007,- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ribu tujuh puluh rupiah) dari alokasi anggaran sesuai **perjanjian kinerja** sebesar Rp 565.350.677.000,- (lima ratus enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 84,75%, 3) Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 37.672.295.596,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dari alokasi anggaran sesuai **yang tidak diperjanjian kinerjakan** sebesar Rp 42.227.764.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 89,21%.

Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016,

yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*) sangat mempengaruhi dalam pencapaian pada masing-masing target anggaran, baik target pada pagu, perjanjian kinerja, dan anggaran yang tidak dikinerjakan.

Alokasi anggaran tersebut dikelompokkan kedalam 4 jenis belanja, yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Modal dan, (4) Bansos. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dengan realisasinya dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Per Jenis Anggaran
Tahun 2016

NO	JENIS BELANJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 5.033.873.000,-	Rp 4.898.525.169,-	97,31
2.	Belanja Barang	Rp 600.965.568.000,-	Rp 510.560.118.874,-	84,96
3.	Belanja Modal	Rp 779.000.000,-	Rp 763.355.560,-	97,99
4.	Bansos	Rp 800.000.000,-	Rp 579.300.000,-	72,41
TOTAL		Rp 607.578.441.000,-	Rp 516.801.299.603,-	85,06

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, yaitu: 1 Januari - 31 Desember 2016. Secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 516.801.299.603,- (lima ratus enam belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan persentase capaian kinerja 85.06%, **ketidak tercapaian realisasi anggaran disebabkan self blocking sebesar Rp. 83.149271.000,-.** Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini

terjadi karena realisasi untuk seluruh jenis belanja tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan uang makan. Sebagai akibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi di Direktorat Bindiktara maka uang makan pegawai tidak terserap 100%.
- b. Belanja Barang, adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengundang mitra dari daerah, dikarenakan: 1) biaya/harga perjalanan maupun akomodasi dibayarkan berdasarkan ad cost dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu dan/atau 2) tidak seluruh peserta yang diundang hadir mengikuti kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai alasan.
- c. Belanja Modal, adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran.
- d. Bansos, adanya retur pada pencairan dana yang disebabkan rekening lembaga tidak aktif.

Sesuai struktur organisasi Direktorat Bindiktara bahwa Direktorat ini terdiri dari 5 bagian, yaitu (1) Subag Tata Usaha, (2) Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, (3) Subdit Program dan Evaluasi, (4) Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan dan, (5) Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca, maka alokasi anggarannya juga dikelompokkan kedalam 5 bagian. Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dengan realisasinya dapat untuk mengukur kinerja Direktorat Bindiktara, seperti tampak pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktara
Berdasarkan Subag Tata Usaha dan Subdit
Tahun 2016

NO	BAGIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Subbag Tata Usaha	Rp 19.515.984.000,-	Rp 18.276.433.904,-	93,65
2.	Subdit Kemitraan dan Kelembagaan	Rp 92.394.226.000,-	Rp 77.950.558.416,-	84,37
3.	Subdit Program dan Evaluasi	Rp 22.625.730.000,-	Rp 19.725.696.458,-	87,18

4.	Subdit Pendidikan Kesenjangan dan Pendidikan Berkelanjutan	Rp 371.049.397.000,-	Rp 316.690.763.625,-	85,35
5.	Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca	Rp 101.993.104.000,-	Rp 84.157.847.200,-	82,51
Total		Rp 607.578.441.000,-	Rp 516.801.299.603,-	85,06

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, yaitu: 1 Januari - 31 Desember 2016. Secara umum penggunaan anggaran telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk mewujudkan target capaian kinerja penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebesar Rp 516.801.299.603,- (lima ratus enam belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp 607.578.441.000,- (enam ratus tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) **dengan persentase capaian kinerja 85.06%, ketidak tercapaian realisasi anggaran disebabkan self blocking sebesar Rp. 83.149271.000,-.**

Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*) sangat mempengaruhi dalam pencapaian target anggaran yang terdapat pada Subbag Tata Usaha dan empat Subdit.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%. Hal ini terjadi karena realisasi untuk seluruh bagian (Subbag Tata Usaha, Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, Subdit Program dan Evaluasi, Subdit Pendidikan Kesenjangan dan Pendidikan Berkelanjutan dan, Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca) tidak mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Subbag Tata Usaha:

- Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan uang makan. Sebagai akibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi di Direktorat Bindiktara maka uang makan pegawai, tidak dapat terserap dengan maksimal;

- Belanja Modal, adanya efisiensi pada harga barang di bawah pagu anggaran;
 - Capaian Kinerja pada Subbag Tata Usaha sebesar 93,65%, ketidak tercapaian realisasi Subbag ini disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 1.012.272.000,- (dari Rp. 19.515.984.000,- menjadi Rp. 18.503.712.000,-).
- b. Subdit Kemitraan dan Kelembagaan, capaian kinerja sebesar 84,37%, ketidak tercapaian realisasi Subdit tersebut disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 8.180.388.000,- (dari anggaran Rp. 92.394.226.000,- menjadi Rp. 84.213.838.000,-);
 - c. Subdit Program dan Evaluasi, capaian kinerja sebesar 87,18%, ketidak tercapaian realisasi Subdit tersebut disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 632.284.000,- (dari Rp. 22.625.730.000,- menjadi Rp. 21.993.446.000,-);
 - d. Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan, capaian kinerja sebesar 85,35%, ketidak tercapaian realisasi Subdit tersebut disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 70.334.165.000,- (dari Rp. 371.049.397.000,- menjadi Rp. 300.715.232.000,-) dan;
 - e. Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca, capaian kinerja sebesar 82,51%, ketidak tercapaian realisasi Subdit tersebut disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 2.990.162.000,- (dari Rp. 101,993,104,000,- menjadi Rp. 99.002.942.000,-).

2. Anggaran Berdasarkan Kontrak Kinerja

Kinerja Direktorat Bindiktara tahun 2016 dapat dilihat dari pencapaian target IKK, hal ini menggambarkan pencapaian strategis dan tujuan organisasi. Pencapaian tersebut yang merupakan manifestasi dari realisasi pencapaian indikator kinerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan hambatan yang timbul dan dihadapi dalam melaksanakan komponen untuk mencapainya. Sampai 31 Desember 2016 ini, secara umum kinerja Direktorat Bindiktara sudah akuntabel, hal ini ditunjukkan oleh capaian target berdasarkan anggaran

dari setiap 18 IKK, sebagai berikut: kesemuanya mencapai kurang dari 100% dari target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap indikator kinerja, berikut disampaikan ketercapaian indikator kinerja layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang diukur/dilihat dari ketercapaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan anggaran sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Bindiktara dengan Direktur Jenderal Paud dan Dikmas, alokasi anggaran Direktorat Bindiktara yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu sebanyak 18 IKK sebagai output kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar Rp 479.129.004.007,- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ribu tujuh rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp 565.350.677.000,- (lima ratus enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 84,75%, 18 indikator kinerja dimaksud (lampiran 3) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja

“Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar”

Untuk melihat tingkat ketercapaian Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target anggaran dan realisasinya.

Bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 target IKK “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar” telah dapat dicapai 96,32%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 1.511.270.000,- (dari anggaran Rp. 45.871.338.000,- menjadi Rp. 44.360.068.000,-).

Perealisasi IKK ini didukung oleh output “Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar”, yang sampai dengan akhir tahun 2016 ini telah dapat

merealisasikan anggaran sebesar Rp. 44.185.475.687,- dari Rp. 45.871.338.000,- yang ditargetkan.

2. Indikator Kinerja

“Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A”

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A” telah dapat dicapai 94,04%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking sebesar Rp. 1.376.032.000,- (dari target Rp. 41.758.306.000,- menjadi Rp. 40.382.274.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri”, yang telah mampu merealisasikan anggaran anggaran Rp. 39.267.875.640,- dari Rp. 41.758.306.000,- yang ditargetkan.

3. Indikator Kinerja

“Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional”

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional” berdasarkan target anggaran Perjanjian Kinerja telah **dapat** dicapai 85,09%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 1.870.000.000,-** (dari Rp.12.540.000.000,- menjadi Rp. 10.670.000.000,-).

Perealisasi ini didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)”, yang telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 10.670.000.000,- dari target Rp. 12.540.000.000,-.

Apabila disandingkan dengan anggaran setelah self blocking maka pencapaian kinerjanya sebesar 100%, walaupun sesungguhnya telah terjadi self blocking sebesar Rp. 1.870.000.000,- akan tetapi tetap tidak mempengaruhi dari pencapaian kinerja tersebut, dengan kata lain hal ini telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 17,52% dari realisasi anggaran yang dicapai.

4. Indikator Kinerja

“Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional”

Ketercapaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional” telah **dapat** dicapai 74,78%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking target anggaran sebesar Rp. 33.377.165.000,-** (dari Rp. 134.149.769.000,- menjadi Rp. 100.772.604.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)”, yang telah mampu merealisasikan anggaran bantuan tersebut sebesar Rp. 100.313.540.752,- dari target Rp. 134.149.769.000,- .

5. Indikator Kinerja

“Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional”

Ketercapaian sasaran strategis Indikator Kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” dapat dilihat melalui pencapaian IKK dengan membandingkan target anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan menengah umum (Paket C) dan vokasional” telah dapat dicapai 82,88% **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 34.921.000.000,-** (dari Rp.205.831.441.000,- menjadi Rp. 170.910.441.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional”, yang telah mampu merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 170.585.088.847,- dari target Rp. 205.831.441.000,- dan juga didukung oleh 2 Sub Output, yaitu (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C, yang telah merealisasikan anggaran Rp. 133.507.485.847,- dari Rp. 168.753.838.000,- dari yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 79,11% dan, (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yang telah merealisasikan anggaran Rp. 37.077.603.000,- dari Rp. 37.077.603.000,- yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 100%.

6. Indikator Kinerja

“Jumlah Komunitas sekolah (Homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)”

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)”** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- maka persentase capaian kinerjanya 0%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 untuk output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (alokasi anggarannya sebesar Rp. 0).**

7. Indikator Kinerja

“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi”** telah **dapat** dicapai 97,58%.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Jumlah Desa Melaksanakan Pemberdayaan Desa Vokasi”, yang telah mampu merealisasikan Rp. 3.615.821.000,- dari Rp. 3.705.345.000,- yang ditargetkan.

8. Indikator Kinerja

“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya. Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi”** telah **dapat** dicapai 98,50%.

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi”, yang telah mampu merealisasikan anggaran Rp. 4.209.272.750,- dari Rp. 4.273.365.000,- yang ditargetkan.

9. Indikator Kinerja

“Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan”

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan”** telah tercapai 94,07% **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 166.000.000,-** (dari Rp. 17.915.190.000,- menjadi Rp. 17.749.190.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Perempuan Marginal Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup”, yang telah mampu merealisasikan anggaran Rp. 16.853.578.731,- dari Rp. 17.749.190.000,- yang ditargetkan.

10. Indikator Kinerja

“Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota”

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja **“Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota” dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-** maka persentase capaian kinerjanya 0% **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (alokasi anggarannya sebesar Rp. 0).**

11. Indikator Kinerja

“Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM” telah tercapai 89,25% **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 3.896.813.000,-** (dari Rp.32.927.681.000,- menjadi Rp.36.824.494.000,-)

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat”, yang telah mampu merealisasikan anggaran Rp. 36.824.494.000,- dari Rp. 32.927.681.000,- target yang telah ditetapkan dan juga didukung oleh 2 Komponen, yaitu (1) “Bantuan Penataan Kelembagaan

satuan PNF” dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 31.877.681.000,- dari Rp. 35.324.494.000,- yang ditargetkan atau pencapaian kinerjanya 90,24% dan, (2) “Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra” dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dari Rp. 1.500.000.000,- yang ditargetkan dengan pencapaian kinerjanya 70%.

12. Indikator Kinerja

“Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat” telah tercapai 80,00% ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (dari Rp. 5.000.000.000,- menjadi Rp.4.000.000.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Bantuan Sarana TBM”, yang telah mampu merealisasikan bantuan tersebut untuk menyalurkan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari alokasi anggaran Rp. 5.000.000.000,- yang ditargetkan.

13. Indikator Kinerja

“Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar”

Ketercapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan SKB” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB” **dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-** maka persentase capaian kinerjanya 0%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh revisi DIPA01 untuk output yang mendukung IKK ini sudah tidak ada lagi (alokasi anggarannya sebesar Rp. 0).**

14. Indikator Kinerja

“Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas” dengan pencapaian kinerja 92,62%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 3.283.575.000,- (dari Rp. 47.672.784.000,- menjadi Rp. 44.389.209.000,-).**

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan”, yang telah mampu merealisasikan alokasi anggaran dari Rp. 44.155.910.900,- dari Rp. 47.672.784.000,- yang ditargetkan.

15. Indikator Kinerja

“Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran fisik dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas” dengan capaian kinerja 88,33%, ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dari Rp. 14.350.000.000,- menjadi Rp.12.350.000.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat” yang telah mampu merealisasikan anggaran Rp.12.675.241.000,- dari Rp. 14.350.000.000,- yang ditargetkan, dan 2 Komponen (1) “Bantuan Sarana SKB” merealisasikan anggaran Rp. 10.325.241.000,- dari Rp. 12.000.000.000,- yang ditargetkan dan (2) “Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB”, merealisasikan anggaran Rp. 2.350.000.000,- dari Rp. 2.350.000.000,- yang ditargetkan.

16. Indikator Kinerja

“Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan” dengan capaian kinerja 73,00%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 50.919.000,-** (dari Rp. 1.528.057.000,- menjadi Rp. 1.514.085.450,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat” yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.115.453.750 dari Rp. 1.528.057.000,- yang ditargetkan.

17. Indikator Kinerja

“Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” dengan capaian kinerja 85,38%, **ketidak tercapaian realisasi dari IKK ini disebabkan oleh self blocking anggaran sebesar Rp. 294.165.000,-** (dari Rp. 5.321.930.000,- menjadi Rp. 5.027.765.000,-).

Perealisasiannya didukung oleh 1 output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” yang telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.544.063.650,- dari Rp. 5.321.930.000,- yang ditargetkan dan 2 Sub Output (1) “Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat” merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.646.595.000,- dari Rp. 1.679.815.000,- yang ditargetkan dan (2) “Dokumen Evaluasi Kebijakan”, merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.764.918.650,- dari Rp.3.642.115.000,- yang ditargetkan.

18. Indikator Kinerja

“Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi”

Ketercapaian Sasaran strategis dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi” dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan target sasaran anggaran dan realisasinya.

Selama tahun 2016, Sasaran strategis dengan indikator “Jumlah Dokumen Penyelenggaraan HAI, Lomba, dan Apresiasi” dengan capaian kinerja 92,91%.

Perealisasinya didukung oleh 1 Komponen “Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional” telah dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.748.897.400,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.958.658.000,- yang ditargetkan.

3. Anggaran Yang Tidak Dikontrak kinerjakan

Kalau dilihat alokasi anggaran penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tahun 2016 sebesar *Rp 607,578,441,000,-* sedangkan yang dikontrak kinerjakan antara Direktur Jenderal Paud dan Dikmas – Direktur Bindiktara sebesar *Rp. 565.350.677.000,-*. Artinya terdapat anggaran sebesar **Rp. 42.227.764.000,-** yang tidak dikontrak kinerjakan, dengan capaian kinerja sebesar **89,21%**, yaitu terealisasi anggaran sebesar Rp. 37.672.295.596,- dari Rp. 42.227.764.000,- yang telah ditargetkan, seperti tampak pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Daya Serap Anggaran Direktorat Bindiktra
Yang tidak di Perjanjian Kinerjakan
Tahun 2016

NO	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Yang tidak di Perjanjian Kinerjakan	Rp 42.227.764.000,-	Rp 37.672.295.596,-	89,21



BAB 4

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja menunjukkan ketercapaian yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja tahunan. Akuntabilitas kinerja ini akan menggambarkan kinerja secara keseluruhan Direktorat Bindiktara Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas yang telah dapat direalisasikan oleh keempat subdirektorat yang ada. Untuk dapat mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Bindiktara dapat diukur dengan IKK yang telah ditetapkan. Namun perlu diketahui bahwa pencapaian kinerja ini: (1) sangat tergantung pada terlaksananya jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, (2) kebijakan pelaksanaan anggaran, dan (3) IKK yang ditetapkan untuk 1 tahun anggaran.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Direktorat Bindiktara adalah telah menunjukkan hasil yang baik, sehingga dapat dikatakan capaian kinerja Direktorat Bindiktara sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Memang dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yang sangat mengganggu, yaitu Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*).

Demikian LAKIP Tahun 2016 Direktorat Bindiktara ini disusun, selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target kinerja Direktorat

Bindiktara tahun 2017. Diharapkan dari LAKIP Tahun 2016 ini dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja subdirektorat-subdirektorat di lingkungan Direktorat Bindiktara untuk mencapai target IKK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019.



Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
5. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

TARGET CAPAIAN

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

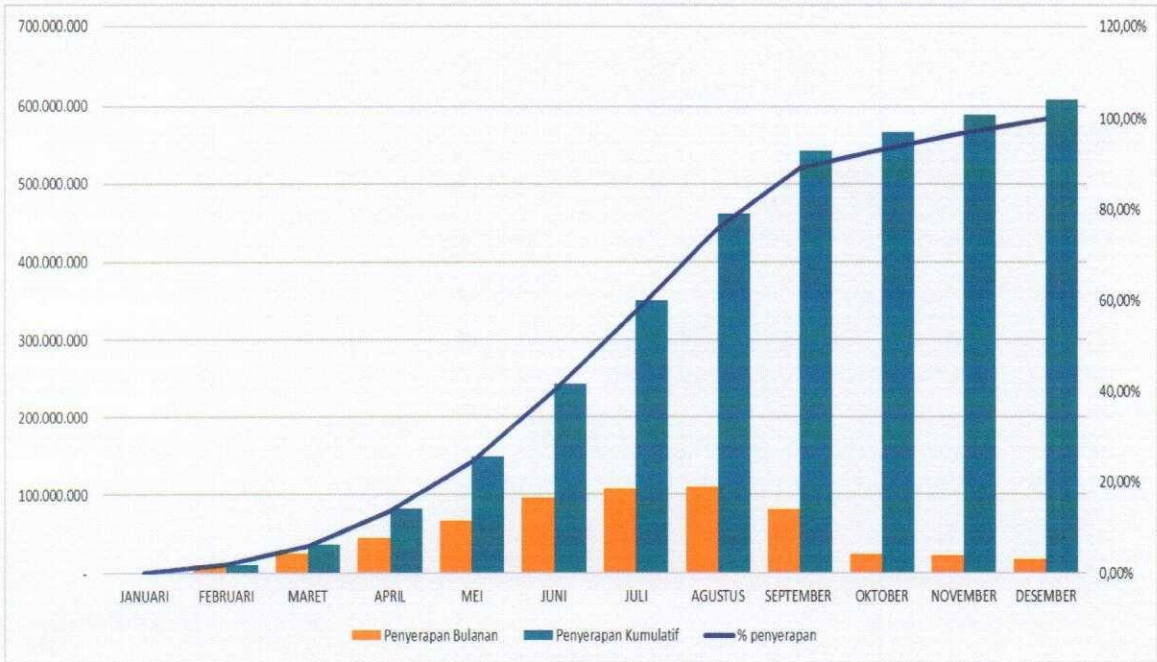
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	ANGGARAN
Meningkatnya remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	65.950 Orang	45.871.338.000
	Output:		
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar	65.950 Orang	45.871.338.000
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	59.000 Orang	41.758.306.000
	Output:		
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	59.000 Orang	41.758.306.000
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	11.000 Orang	12.540.000.000
	Output:		
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)	11.000 Orang	12.540.000.000
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	93.986 Orang	134.149.769.000
	Output:		
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)	93.986 Orang	134.149.769.000
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	144.800 Orang	205.831.441.000
	Output:		
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional	144.800 Orang	205.831.441.000
	Sub Output		
	a. Pendidikan Kesetaraan Paket C	97.600 Orang	168.753.838.000
	b. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional	17.200 Orang	37.077.603.000
	6. Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	0 Lembaga	0

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	ANGGARAN
	7. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	20 Desa	3.705.345.000
	Output:		
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	20 Desa	3.705.345.000
	8. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	31 Desa	4.273.365.000
	Output:		
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	31 Desa	4.273.365.000
	9. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	10.000 Orang	17.915.190.000
	Output:		
	Perempuan Marginal Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	10.000 Orang	17.915.190.000
	10. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	0 Lembaga	0
	11. Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	329 Lembaga	36.824.494.000
	Output:		
	Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	329 Lembaga	36.824.494.000
	Komponen:		
	a. Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF	299 Lembaga	35.324.494.000
	b. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra	30 Lembaga	1.500.000.000
	12. Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat.	100 Lembaga	5.000.000.000
	Output:		
	Bantuan sarana TBM	100 Lembaga	5.000.000.000
	13. Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB	0 Lembaga	0
	14. Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	20 Lembaga	47.672.784.000
	Output:		
	Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan	20 Lembaga	47.672.784.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	ANGGARAN
	15. Jumlah Satuan Pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	167 Lembaga	14.350.000.000
	Output:		
	Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat	167 Lembaga	14.350.000.000
	Komponen:		
	a. Bantuan Sarana SKB	120 Lembaga	12.000.000.000
	b. Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB	47 Lembaga	2.350.000.000
	16. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	19 Dokumen	1.528.057.000
	Output:		
	Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat	19 Dokumen	1.528.057.000
	17. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	2 Dokumen	5.321.930.000
	Output:		
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	2 Dokumen	5.321.930.000
	Sub Output		
	a. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat	1 Dokumen	1.679.815.000
	b. Dokumen Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	3.642.115.000
	18. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	1 Dokumen	2.958.658.000
	Komponen:		
	Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional	1 Dokumen	2.958.658.000

Total Jumlah anggaran kegiatan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Rp 607.578.441.000,-
Terbilang: *Enam Ratus Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2016
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan



KOMPONEN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Penyerapan Bulanan	607.578	10.875.654	25.287.648	45.453.403	66.329.129	95.229.192	107.046.543	110.255.189	81.312.533	24.155.498	22.531.882	18.494.191
Penyerapan Kumulatif	607.578	11.483.233	36.770.881	82.224.284	148.553.413	243.782.605	350.829.148	461.084.337	542.396.870	566.552.368	589.084.250	607.578.441
% penyerapan	0,10%	1,89%	6,05%	13,53%	24,45%	40,12%	57,74%	75,89%	89,27%	93,25%	96,96%	100%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar



Jakarta, 30 November 2016
Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan

Erman Syamsuddin

Lampiran 2

Target dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

Direktur Jenderal Paud dan Dikmas dan Direktur Bindiktara Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Fasilitasi, kompetensi penyelenggara/ pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan global kewarganegaraan	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Orang	65.950	45.871.338.000
	Output:			
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Orang	65.950	45.871.338.000
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	Orang	59.000	41.758.306.000
	Output:			
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	Orang	59.000	41.758.306.000
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	11.000	12.540.000.000
	Output:			
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)	Orang	11.000	12.540.000.000
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	93.986	134.149.769.000
	Output:			
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)	Orang	93.986	134.149.769.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	Orang	144.800	205.831.441.000
	Output:			
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional	Orang	144.800	205.831.441.000
	Sub Output			
	a. Pendidikan Kesetaraan Paket C	Orang	97.600	168.753.838.000
	b. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional	Orang	17.200	37.077.603.000
	6. Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lembaga	0	0
	7. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	Desa	20	3.705.345.000
	Output:			
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	Desa	20	3.705.345.000
	8. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	Desa	31	4.273.365.000
	Output:			
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	Desa	31	4.273.365.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	9. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Orang	10.000	17.915.190.000
	Output:			
	Perempuan Marginal Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	Orang	10.000	17.915.190.000
	10. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	Lembaga	0	0
	11. Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga	329	36.824.494.000
	Output:			
	Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	Lembaga	329	36.824.494.000
	Komponen:			
	a. Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF	Lembaga	299	35.324.494.000
	b. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra	Lembaga	30	1.500.000.000
	12. Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat.	Lembaga	100	5.000.000.000
	Output:			
	Bantuan sarana TBM	Lembaga	100	5.000.000.000
	13. Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB		0	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	14. Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lembaga	20	47.672.784.000
	Output:			
	Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan	Lembaga	20	47.672.784.000
	15. Jumlah Satuan Pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lembaga	167	14.350.000.000
	Output:			
	Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat	Lembaga	167	14.350.000.000
	Komponen:			
	a. Bantuan Sarana SKB	Lembaga	120	12.000.000.000
	b. Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB	Lembaga	47	2.350.000.000
	16. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	Dokumen	19	1.528.057.000
	Output:			
	Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat	Dokumen	19	1.528.057.000
	17. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	5.321.930.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	Output:			
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen	2	5.321.930.000
	Sub Output			
	a. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat	Dokumen	1	1.679.815.000
	b. Dokumen Evaluasi Kebijakan	Dokumen	1	3.642.115.000
	18. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	1	2.958.658.000
	Komponen:			
	Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional	Dokumen	1	2.958.658.000

Lampiran 3
Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	1. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	Orang	65,950	45.871.338.000	64.280	97,47	44.185.475.687	96,32
	Output:							
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Orang	65,950	45.871.338.000	64.280	97,47	44.185.475.687	96,32
	2. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan Pra Paket A	Orang	59,000	41.758.306.000	57.940	98,20	39.267.875.640	94,04
	Output:							
	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	Orang	59,000	41.758.306.000	57.940	98,20	39.267.875.640	94,04
	3. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	11.000	12.540.000.000	9.500	86,36	10.670.000.000	85,09
	Output:							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket A)	Orang	11.000	12.540.000.000	9.500	86,36	10.670.000.000	85,09
	4. Jumlah remaja dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar: jumlah siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	93.986	134.149.769.000	71.529	76,11	100.313.540.752	74,78
	Output:							
	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar (Paket B)	Orang	93.986	134.149.769.000	71.529	76,11	100.313.540.752	74,78
	5. Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum (Paket C) dan vokasional	Orang	144.800	205.831.441.000	95.900	66,23	170.585.088.847	82,88
	Output:							
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasional	Orang	144.800	205.831.441.000	95.900	66,23	170.585.088.847	82,88
	Sub Output							
	a. Pendidikan Kesetaraan Paket C	Orang	97.600	168.753.838.000	78.700	80,64	133.507.485.847	79,11

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	b. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Menengah Vokasional	Orang	17.200	37.077.603.000	17.200	100	37.077.603.000	100
	6. Jumlah komunitas sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh bantuan operasional komunitas sekolah rumah (BOKSR)	Lembaga	0	0	0	0	0	0
	7. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	Desa	20	3,705.345.000	20	100	3.615.821.000	97,58
	Output:							
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan desa vokasi	Desa	20	3,705.345.000	20	100	3.615.821.000	97,58
	8. Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	Desa	31	4.273.365.000	31	100	4.209.272.750	98,50
	Output:							
	Jumlah desa melaksanakan pemberdayaan kampung literasi	Desa	31	4.273.365.000	31	100	4.209.272.750	98,50

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	9. Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	Orang	10.000	17.915.190.000	10.000	100	16.853.578.731	94,07
	Output:							
	Perempuan Marginal Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	Orang	10.000	17.915.190.000	10.000	100	16.853.578.731	94,07
	10. Jumlah PKBM pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh pemda kab/kota	Lembaga	0	0	0	0	0	0
	11. Jumlah PKBM memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga	329	36.824.494.000	280	85,11	32.864.114.900	89,25
	Output:							
	Penataan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	Lembaga	329	36.824.494.000	280	85,11	32.864.114.900	89,25

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	Komponen:							
	a. Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF	Lembaga	299	35.324.494.000	259	86,62	31.877.681.000	90,24
	b. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra	Lembaga	30	1.500.000.000	30	100	1.050.000.000	70,00
	12. Jumlah TBM memperoleh bantuan sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat.	Lembaga	100	5.000.000.000	80	80	4.000.000.000	80
	Output:							
	Bantuan sarana TBM	Lembaga	100	5.000.000.000	80	80	4.000.000.000	80
	13. Jumlah TBM baru yang dibentuk disatuan pendidikan SKB		0	0	0	0	0	0
	14. Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lembaga	20	47.672.784.000	20	100	44.155.910.900	92,62
	Output:							
	Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan	Lembaga	20	47.672.784.000	20	100	44.155.910.900	92,62

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	15. Jumlah Satuan Pendidikan SKB memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lembaga	167 (68)	14.350.000.000	147	88,02 (216,17)	12.675.241.000	88,33
	Output:							
	Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat	Lembaga	167	14.350.000.000	147	88,02	12.675.241.000	88,33
	Komponen:							
	a. Bantuan Sarana SKB	Lembaga	120	12.000.000.000	100	83,33	10.325.241.000	86,04
	b. Bantuan Sarana TIK untuk SPNF-SKB	Lembaga	47	2.350.000.000	47	100	2.350.000.000	100
	16. Jumlah dokumen NSPK pendidikan masyarakat	Dokumen	19	1.528.057.000	19	100	1.115.453.750	73,00
	Output:							
	Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat	Dokumen	19	1.528.057.000	19	100	1.115.453.750	73,00
	17. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	5.321.930.000	2	100	4.544.063.650	85,38
	Output:							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					FISIK	%	ANGGARAN	%
	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen	2	5.321.930.000	2	100	4.544.063.650	85,38
	Sub Output							
	a. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat	Dokumen	1	1.679.815.000	1	100	1.646.595.000	98,02
	b. Dokumen Evaluasi Kebijakan	Dokumen	1	3.642.115.000	1	100	2.764.918.650	75,92
	18. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	1	2.958.658.000	1	100	2.748.807.400	92,91
	Komponen:							
	Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Melalui Hari Aksara Internasional	Dokumen	1	2.958.658.000	1	100	2.748.807.400	92,91